

PETUNJUK PENELUSURAN LITERATUR HUKUM INDONESIA

oleh

Gregory Churchill

Pusat Dokumentasi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

I. ARTI PENELUSURAN LITERATUR HUKUM

Setiap kali kita sebagai ahli hukum menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan, kita diharapkan membicarakan segi-segi hukum dari masalah tersebut. Kita ditantang menemukan kaedah hukum yang berlaku terhadap persoalan itu, menjelaskan arti dari kaedah hukum itu dan memberi petunjuk tentang pelaksanaannya atau penerapannya terhadap masalah tersebut. Usaha menemukan kaedah hukum, terutama yang tertulis, merupakan usaha yang dinamakan penelusuran literatur hukum.

Penelusuran literatur hukum tidak merupakan suatu ilmu yang ghaib, melainkan merupakan ilmu yang diperoleh dari pengalaman, dari percobaan, kesalahan dan perbaikan. Beberapa petunjuk dapat diberikan; beberapa jalan pintas dapat ditempuh, akan tetapi tidak terdapat suatu cara yang mutlak perlu, kecuali kecermatan dan kecerdasan. Setiap ahli hukum diharapkan fasih melakukan penelusuran literatur hukum, terutama supaya ia dapat mempertanggung jawabkan kebenaran ucapannya (nasihatnya, tulisannya, putusannya) dari segi hukum. Akan tetapi bukan hanya ahli hukum yang dapat melakukan penelusuran literatur hukum. Orang lain pun dapat melakukannya dengan baik.

Karena kita dalam melakukan penelusuran literatur hukum harus mengolah bahan-bahan tertulis, banyak masalah yang dihadapi berkisar terhadap bahasa, terhadap arti dan pemakaian istilah. Baik peraturan perundang-undangan, perjanjian, yurisprudensi, risalah legislatif, maupun karangan ahli hukum mempunyai kekhususan bahasa. Kita menemukan kekhususan bahasa ini berulang kali dalam bahan hukum dan usaha kita menemukan kaedah hukum yang berlaku akan dipermajukan kalau kita berhasil mengenal kekhususan tersebut serta mengerti batasan-batasannya.

Sesudah kita menemukan sesuatu yang kiranya bersangkutan paut dengan persoalan yang diteliti, baik yang langsung membicarakan masalah yang kita hadapi maupun yang karena kekhususan bahasa tadi dapat diduga berpengaruh terhadap penyelesaian masalah tersebut, maka kita harus menentukan sejauh mana hal-hal yang ditemukan itu dapat dipercayakan atau diandalkan. Kita harus mencari apakah kaedah yang ditemukan pernah ditafsirkan, pernah dijelaskan, pernah diubah atau pernah dibatasi, biar dalam bahan hukum yang sedang dipegang/dibaca ataupun dalam bahan hukum lain. Suatu peraturan, seumpamanya, hampir selalu didasari suatu undang-undang atau suatu peraturan yang lebih tinggi.

Sebelum kita dapat mengerti peraturan itu seringkali kita harus mempelajari undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tersebut. Kalau peraturannya pernah diperkarakan, kita harus mencari dan mempelajari putusan pengadilan atau yurisprudensi tentang hal itu. Yang menjadi kesulitan dalam usaha ini adalah kenyataan bahwa biasanya kalau kita sudah menemukan sesuatu bahan hukum yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti kita tidak menemukan isyarat tentang dimana bahan-bahan lain yang juga berkaitan dapat ditemukan. Disini kefasihan kita menelusuri bahan menjadi amat penting: kita harus menjelajah guna mengungkapkan hubungan-hubungan di antara satu bahan hukum dengan bahan-bahan hukum yang lain, di antara satu ucapan hukum dengan ucapan hukum yang lain.

Hubungan-hubungan tersebut merupakan gejala dari setiap sistem hukum, dan setiap sistem hukum pula akan memperlihatkan satu perangkat hubungan yang khas. Kekhasan ini harus dimengerti serta diamati oleh orang yang hendak menelusuri literatur hukum sistem itu. Kita harus menyadari pula bahwa hubungan tersebut tidak selalu terlihat dengan jelas seperti jalan dalam peta kota. Kita sering akan perlu mengungkapkan hubungan tersebut dengan cara beranalogi, karena masalah yang ditangani atau persoalan yang diteliti belum pernah secara eksplisit dibicarakan dalam bahan hukum. Dengan begitu kita diharapkan menilai sejauh mana kaedah-kaedah hukum yang ada, yang ditujukan kepada ataupun yang membicarakan hal-hal lain, dapat dikatakan berlaku juga terhadap permasalahan yang kita hadapi.

Biarpun telah ditemukan satu atau beberapa kaedah hukum tertulis yang menyangkut permasalahan itu, pekerjaan penelusuran belum selesai. Kita akan selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa bahasa hukum memungkinkan berbagai macam penafsiran dan bahwa usaha penafsiran itu sendiri dapat menentukan penyelesaian berdasarkan hukum. Dengan demikian, kita harus selalu berusaha menyadari segala macam penafsiran yang dapat diterapkan atas kaedah yang dianggap penting dan harus bersedia menelusuri bahan tambahan yang dapat memperkuat ataupun membatasi setiap penafsiran itu. Dalam hal ini, ada baiknya kita mawas diri tentang dua sikap yang amat penting dalam melakukan penelusuran literatur hukum, ialah,

pertama bahwa kita harus luwes and kedua bahwa kita harus hindari prasangka. Kita harus luwes karena dalam mencari kaedah hukum dan hubungan antar kaedah hukum, kita akan sering menempuh jalan buntu, sering menemukan hal-hal yang sepertinya tidak penting akan tetapi belakangan disadari sebagai hal-hal yang menentu, dan sering baru akan mengerti apa yang kita cari sesudah kita menemukannya. Kita harus hindari prasangka atau dalam kata lain menahan diri dari kesimpulan yang terlalu dini, karena hasil penelusuran literatur hukum yang baik adalah satu uraian terperinci tentang keadaan kaedah-kaedah hukum yang menyangkut suatu permasalahan dengan secara konsekwen mencerminkan semua ciri-ciri kaedah tersebut, termasuk baik ketegasan dan kekuatannya maupun kekaburan dan kelemahannya. Dalam menelusuri literatur hukum kita berusaha menggambarkan segala hal yang mungkin mempengaruhi penyelesaian hukum terhadap suatu permasalahan, segala hal yang merupakan pilihan yang diizinkan oleh hukum, segala faktor yang dianggap penting oleh hukum dan tata cara hukum memperlakukan faktor tersebut. Pada saat kita melakukan penelusuran kita tidak diharapkan menyelesaikan permasalahan, melainkan diharapkan menemukan dan menjelaskan segala macam cara penyelesaian yang dimungkinkan oleh hukum.

II. PENELUSURAN LITERATUR HUKUM - PENDEKATAN UMUM

Sebelum kita dapat betul-betul mengerti suatu masalah hukum, baik yang dihadapi dalam kantor atau biro hukum, dalam pengadilan, dalam badan legislatif, dalam perguruan tinggi maupun dalam kehidupan sehari-hari, harus terlebih dahulu ditentukan dan mempertimbangkan fakta-fakta apa yang relevan terhadap masalah itu. Biarpun suatu prinsip hukum sudah jelas, perbedaan dalam kenyataan dapat mengakibatkan penyelesaian hukum yang berlainan. Penyelidikan dan pengusutan tentang fakta apa yang terdapat dalam satu situasi atau keadaan yang dipersoalkan harus selalu mendahului penelusuran literatur hukum. Setelah fakta-fakta itu ditemukan, faktanya harus disaring -- fakta yang mana yang penting menurut hukum -- harus disusun -- supaya dapat dikaitkan satu sama lain menurut hubungan yang dianggap penting oleh hukum -- dan harus dinilai -- tentang pemanfaatannya dalam usaha mencari kaedah hukum. Biasanya, kita harus mengidentifikasi empat kelompok fakta:

1. Barang atau hal yang dipersoalkan: apakah tanah, harta, kedudukan, wewenang, ketertiban, kesusilaan, dsb.
2. Dasar Tuntutan atau Pembelaan yang diajukan: apakah janji, kelalaian, tanggung jawab, kekebalan, persyaratan, dsb.
3. Upaya hukum yang dikehendaki: apakah ganti rugi, bantuan, hukuman, pelaksanaan janji, penertiban, dsb.

4. Orang atau pihak yang terlibat: apakah perorangan atau kelompok orang, golongan khusus seperti pejabat, pengusaha, buruh dan majikan, konsumen atau suami-isteri, golongan hukum seperti belum dewasa atau kurang wajar atau lembaga seperti instansi, kota, desa atau badan hukum.

Hasil identifikasi ini, disamping memperjelas persoalannya, dapat juga memberi petunjuk kepada kita dalam pemakaian alat penelusuran seperti indeks subyek atau daftar isi buku hukum.

Setelah kita selesai menentukan dan menyusun fakta-fakta yang dinilai penting, kita harus menentukan persoalan-persoalan hukum yang mana yang mungkin timbul dari keadaan yang bersangkutan. Setiap keadaan dapat menyangkut beberapa hubungan menurut hukum dan kita harus mengidentifikasikan serta memperjelaskan setiap satu.

Di sini kita akan mulai memakai bahan tertulis guna menggariskan ruang-lingkup permasalahan. Biasanya kita akan berkonsultasi dengan bahan tertulis yang agak umum sifatnya seperti buku, artikel majalah atau entri kamus dan ensiklopedi dalam usaha memperoleh satu gambaran umum tentang persoalan-persoalan hukum yang harus diperhatikan dalam setiap bidang permasalahan. Seumpamanya kalau masalah yang ditangani atau meneliti menyangkut majikan dan buruh, kita dapat membaca bahan pengantar hukum perburuhan guna mencari hubungan apakah di antara mereka yang dianggap penting oleh hukum.

Dalam satu kegiatan yang bersinambung, kita dengan berpangkal tolak dari bahan umum tersebut akan mulai mendalami persoalannya pertama-tama dengan mencari bahan sekunder, seperti analisa ahli, yang membicarakan faktor-faktor yang penting secara lebih terperinci dan akhirnya dengan mencari bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian, yang mengandung kaedah hukum yang dapat menyelesaikan masalahnya. Dalam mencari bahan primer itu kita dapat memakai berbagai macam cara penelusuran. Seumpamanya kita dapat mulai dengan satu indeks atau daftar isi yang disusun berdasarkan subyek. Misalnya kalau kita berusaha menentukan apakah ada peraturan yang mengatur sangsi terhadap pemutusan hubungan kerja secara tidak sah, kita akan cari subyek BURUH, lalu mencari subyek HUBUNGAN KERJA, lalu mencari subyek PEMUTUSAN, dan akhirnya mencari subyek SANGSI. Di bawah (Bagian IV) dijelaskan sifat dari beberapa indeks subyek dan alat-alat yang lain yang tersedia untuk penelusuran hukum Indonesia. Di bawah (Bagian III) dijelaskan pula sarana penelusuran seperti perpustakaan dan pusat dokumentasi hukum yang tersedia di Indonesia. Sebelum kita langsung membaca bahan primer seperti peraturan atau yurisprudensi, kita dapat menghemat waktu dengan mencari bahan pembantu yang menguraikan isinya secara singkat

seperti abstrak peraturan (Lihat IV.A.5.b. dibawah) ataupun rangkuman yurisprudensi (lihat IV.B.2.b dan IV.B.2.d dibawah) supaya kita hanya memakai waktu kita untuk membaca bahan yang relevan saja. Sesudah kita menemukan dan membaca bahan primer yang penting, kita akan ingin mencari bahan penafsiran yang barangkali terdapat dalam bahan umum atau karangan ahli yang kita sudah memperoleh akan tetapi terdapat juga di tempat lain seperti memori penjelasan, risalah legislatif, laporan komisi penyusunan rancangan atau pun petunjuk/fatwa kantor pelaksana.

Kalau dalam usaha ini kita berhasil menemukan kaedah hukum yang bertepatan dengan permasalahan yang diteliti, kita masih akan ingin menentukan apakah kaedah itu masih berlaku. Untuk itu kita akan perlu menelusuri kemutakhiran dari kaedah itu melalui alat seperti indeks citation atau regierings almanak atau melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur hal yang sama pada waktu sesudah kaedah itu diucapkan untuk pertama kalinya. Dan pada akhirnya, kita akan berusaha menguji hasil penelusuran kita dengan melakukan usaha penelusuran tambahan guna mencari bahan atau kaedah hukum lain yang dapat juga memainkan peran dalam penyelesaian persoalan yang kita menangani atau meneliti.

III. SARANA PENELUSURAN

Orang yang mencoba melakukan penelusuran literatur hukum di Indonesia akan langsung berhadapan dengan kenyataan bahwa sarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung usaha penelusuran. Sarana seperti perpustakaan dan pusat dokumentasi masih dalam pengembangan dan masih menghadapi banyak masalah dan tantangan. Ada baiknya orang yang hendak melakukan penelusuran literatur hukum Indonesia dengan baik, mengambil waktu untuk mempersiapkan diri dalam dua hal:

Pertama: berusaha mengunjungi, memakai dan membiasakan diri dengan lembaga sarana penelusuran yang ada di Indonesia, baik mengenai ruas-lingkup koleksinya, cara administrasinya, cara pengolahan bahannya dan perhatian khususnya, dan

Kedua: berusaha mengerti dan memperhatikan usaha yang sedang dilakukan atau yang dapat di lakukan di Indonesia untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki sarana penelusuran tersebut seperti usaha mewujudkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional dan usaha menciptakan alat-alat penelusuran yang baru. Pengambilan waktu untuk usaha ini, dalam jangka panjang dapat meletakkan dasar untuk hubungan lancar di antara kita sebagai ahli hukum atau peneliti hukum yang selalu memerlukan bahan tertulis dan ahli ilmu informasi yang menyimpannya dan mengolahnya dalam bentuk alat penelusuran. Kalau hubungan ini dapat lancar, pekerjaan kita dalam menelusuri literatur hukum menjadi jauh lebih mudah.

Untuk membantu dalam usaha ini, di bawah didaftar beberapa bahan bacaan yang dapat membuka mata kita terhadap usaha pengembangan sarana penelusuran di Indonesia. Didaftar pula beberapa tempat perpustakaan atau pusat dokumentasi yang koleksi hukumnya menarik, sehingga ada baiknya sering dikunjungi dan sering dimanfaatkan.

A. PERPUSTAKAAN

1. Zultanawar
"Fungsi dan Organisasi Perpustakaan dan Dokumentasi"
Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (1976), Hal. 1-8
2. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji
Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Didalam Penelitian Hukum
Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (1979), Hal. 1-37
3. Hornick, Robert N.
Report on the Condition of University Law Libraries in Indonesia, 1971
Bandung: (1971), Hal. 1-27
4. Reksodiputro, Mardjono dan Gregory Churchill
"Pengembangan Sarana Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Hukum"
Seminar Pola Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan.
Aceh: Badan Pembinaan Hukum Nasional (1976), Hal. 201-218
5. Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional
Direktori Perpustakaan Khusus dan Sumber Informasi di Indonesia
Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (ke-7, 1987) xxxviii + 494 hal.

PERPUSTAKAAN DENGAN KOLEKSI HUKUM BAIK

Perpustakaan Fakultas Hukum Negeri: Terutama UI, UGM, UNPAD dan USU.
Perpustakaan Fakultas Hukum Swasta
Perpustakaan Nasional
Perpustakaan DPR-MPR
Arsip Nasional
Perpustakaan Mahkamah Agung
Lembaga Kriminologi UI
Pusat Dokumentasi Hukum - FHUI
Perpustakaan Departemen-Departemen.

B. DOKUMENTASI

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Manual Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Jakarta: BPHN (1988)

- Modul I - Pedoman Prosedur Kerja Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
52 hal.
- Modul II - Pedoman Pengumpulan Bahan Kegiatan (Prakatalogan), 40 hal.
- Modul III - Pedoman Pengolahan
- Sub-Modul IIIA - Pedoman Teknis Pengatalogan Bahan Pustaka dan Pascakatalogan (Berdasarkan UDC), 93 hal.
- Sub-Modul IIIB - Pedoman Teknis Pengatalogan Peraturan Perundang-undangan,
44 hal.
- Sub-Modul IIIC - Pedoman Teknis Pengatalogan Bahan Pustaka dan Pascakatalogan (Berdasarkan DDC), 85 hal.
- Modul IV - Pedoman Pelayanan Informasi, 8 hal, lamp.
- Modul V - Sarana Kerja Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 37 hal.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kurikulum & Silabus Penataran Tenaga Tehnis Dokumentasi Hukum Tingkat Dasar - Madya - Lanjutan.
Jakarta: BPHN (1985), 35 hal.

PUSAT DOKUMENTASI HUKUM

Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PDH-FHUI)
Pusat Dokumentasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusdok-BPHN)
Sekretariat Negara
Biro Hukum, Departemen-Departemen
Biro Hukum, Sekretariat Wilayah di Daerah
Badan Pembinaan Hukum ABRI (BABINKUM-ABRI)

IV. CARA PENELUSURAN/SUMBER BAHAN

Untuk setiap macam bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan pusat, peraturan daerah dan peraturan zaman penjajahan), yurisprudensi, perjanjian, dsb., di bawah didaftar dua hal: pertama alat-alat, berupa katalog, indeks, petunjuk, dan lain sebagainya, yang dapat membantu kita dalam usaha mencari/menelusuri bahan hukum, dan kedua macam-bentuknya bahan itu sendiri, seperti terbitan resmi (lembaran negara, lembaran daerah, dsb.) dan

terbitan swasta, seperti himpunan, kumpulan, edaran berkala, dsb. Yang pertama harus dikenal supaya pekerjaan kita dapat dipercepat dan dipermudah dan yang kedua harus dikenal supaya kita dapat memilih bahan yang daya lakunya paling kuat, ialah yang paling authoritative.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT

a. ALAT PENELUSURAN

- 1) Katalog Kartu Peraturan Perundang-Undangan (di PDH-FHUI dan Pusdok- BPHN)
 - a) Katalog Kronologis Hierarkis Lama
 - b) Katalog Kronologis Hierarkis Baru
 - c) Katalog Subyek Lama
 - d) Katalog Subyek Baru
- 2) Katalog Lembaran Negara SETKAB/PDH-FHUI
- 3) Informasi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jakarta: PDH-FHUI (mulai 1973)
 - a) Newsletter PDH-FHUI 1973/74
 - b) Informasi PDH-FHUI 1975-1976
 - c) Informasi PDH-FHUI 1977-dan seterusnya
- 4) Daftar Subyek Peraturan Perundang-undangan Pusat. Jakarta: PDH-FHUI (mulai 1978).
- 5) Koleksi Mikrofis Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Jakarta: PDH-FHUI (1987).
 - a) Daftar Isi Kartu-kartu Mikrofis (Bagian A) Berdasarkan Nomor, 224 hal.
 - b) Indeks Kartu-kartu Mikrofis (Bagian B) Menurut Bentuk, Tahun dan Nomor Peraturan (5 Jilid) 1904 hal.
- 6) Indonesia. Departemen Kehakiman.
Himpunan Daftar Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
Jilid I - 1945-1972 Kronologis
Jilid II - 1945-1972 Menurut Subyek
Jilid III - 1945-1976 Menurut Abjad.
- 7) Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang Undangan
INFORMASI Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia

- 8) Koesnodiprodjo:
Daftar Penundjuk (Klapper) akan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia. Yogyakarta: oleh Pengarang (1949) 56 hal.
- 9) Sutan Arbi, Nahar dan R. Satjaprawira
Penolong Untuk Memudahkan Mentjari Kependekan Isi Lembaran-Lembaran Negara R.I. yang Dikeluarkan Sedjak Dari Tahun 1950
Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia (1955) 98 hal.
- 10) Pringgodiredjo, S.
Buku Penundjuk (Klapper) menurut Abdjad kepada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Jakarta: Tripitaka (1956) 151 hal.
- 11) Marsono
Petunjuk Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
Jakarta: Ichtiar Baru (1977), 301 hal.
- 12) Buku Petunjuk Lembaran Negara Aceh.
Banda Aceh: Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah-/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 - a) 1962-1971 (1976) 339 hal.
 - b) 1972-1976 (1977) 124 hal.
- 13) Indonesia. Departemen Penerangan. Direktorat Publisitas.
Daftar Peraturan Perundangan RI Tahun 1971 (Siaran Umum VI)
- 14) Pusat Dokumentasi Hukum
Indeks Subyek Peraturan Departemen Keuangan 1960-1964
Jakarta: PDH-FHUI (1974) 58 hal.
- 15) Badan Pemeriksa Keuangan
Daftar Himpunan Peraturan pada Bagian Hukum/-Dokumentasi
Jakarta: BPK (1974) 73 hal.
- 16) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Daftar Subyek Peraturan Perundang-Undangan R.I. 1968-1975
Jakarta: BPHN (1978?) 120 hal.
- 17) Indeks-indeks dari Departemen-Departemen.
 - a) Departemen Dalam Negeri
Warta Katalog Peraturan Perundang-undangan (Terbitan Berkala)

- b) Departemen Kesehatan
 - i) Indeks Beranotasi dari Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Kesehatan dan Kedokteran. Jakarta: Departemen Kesehatan (1981), 67 hal.
 - ii) Indeks Beranotasi dari Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dan Kedokteran serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan (1982).
- c) Departemen Keuangan Informasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Departemen Koperasi Indeks Keputusan/Ins. Menkop [Terbitan Berkala]
- e) Departemen Perdagangan Indeks Kumulatif Keputusan Menteri Perdagangan. Jakarta: Departemen Perdagangan (1986).
- f) Departemen Perhubungan
 - i) Indeks Tingkat Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri Bidang Perhubungan 1980-1983
 - ii) Indeks Tingkat Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri bidang Perhubungan 1984
- g) Departemen Perindustrian Daftar SK Menteri Perindustrian Tahun 1976 s/d 1980.
- h) Departemen Pertambangan dan Energi Lembaran Informasi Hukum Departemen Pertambangan dan Energi [Terbitan Berkala]
- i) Departemen Pertanian Informasi Hukum Peraturan Perundang-undangan bidang Pertanian

b. BAHAN PRIMER

- 1) Terbitan Berkala - Pusat
 - a) Himpunan Koesnodiprodjo
 - b) Lembaran Negara
 - c) Tambahan Lembaran Negara
 - d) Himpunan Peraturan Negara
 - e) Berita Republik Indonesia
 - f) Berita Negara
- 2) Himpunan Departemen
 - a) Seri Berkala
 - b) Himpunan Sektoral
 - c) Koleksi Lembar Lepas
- 3) Himpunan Swasta/Perorangan
- 4) Harian/Mingguan Legislatif

2. PERATURAN DAERAH

a. ALAT PENELUSURAN

- 1) Katalog Kartu Pusdok-BPHN
- 2) Katalog Subyek Pusdok-BPHN
- 3) Katalog Kartu PDH-FHUI/PUOD
Jawa - Sumatra
- 4) Katalog Kartu PDH-FHUI/PUOD
Luar Jawa - Sumatra
- 5) Katalog Subyek PDH-FHUI
- 6) Informasi PDH-FHUI 1977, 1978
- 7) Aceh (Biro Hukum pada Sekretariat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh)
Buku Petunjuk Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh 1957-1974
Banda Aceh: (1974), 95 hal.
- 8) Departemen Dalam Negeri
Warta Katalog Peraturan Perundang-undangan
- 9) Terbitan Berkala dari Sekretariat Daerah
 - a) Aceh
Informasi Peraturan
 - b) Sumatera Utara
Warta Perundang-undangan dan Informasi Hukum
 - c) Sumatera Barat
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
 - d) Riau
Berita Penerbitan Informasi Hukum dan
Perundang-undangan
 - e) Jambi
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
 - f) Bengkulu
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
 - g) Lampung
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
 - h) Jawa Barat
Warta Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Jawa Barat
 - i) Yogyakarta
Informasi Peraturan Perundang-undangan
 - j) Jawa Tengah
Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - k) Jawa Timur
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
 - l) Jakarta
Informasi Peraturan Perundang-undangan

- m) Kalimantan Barat
Media Perundang-undangan
- n) Kalimantan Timur
 - i) Berita Penerbitan Pemerintah Daerah
 - ii) Informasi Peraturan Perundang-undangan
- o) Kalimantan Selatan
Bulletin Informasi Hukum dan Perundang-undangan
- p) Bali
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
- q) Nusa Tenggara Barat
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
- r) Timor Timur
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
- s) Sulawesi Tengah
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
- t) Sulawesi Selatan
Informasi Peraturan Perundang-undangan
- u) Sulawesi Utara
Warta Informasi Perundang-undangan dan SJDI Hukum
- v) Irian Jaya
Informasi Peraturan Perundang-undangan

b. BAHAN PRIMER

- 1) Lembaran Daerah
- 2) Himpunan Peraturan Daerah
- 3) Bulletin Peraturan Daerah
- 4) Tambahan Berita Negara

3. PERATURAN ZAMAN PENJAJAHAN

a. PERATURAN ZAMAN HINDIA BELANDA

1) ALAT PENELUSURAN

- a) Regierings Almanac 1942
- b) Hekmeijer, F.C.
Nieuwe Klapper of de Indische Staats-en Bijbladen (Bijgewerkt tot 1 Januari 1933)
Semarang: G.C.T. van Dorp (1933), 250 bb.
- c) Hekmeijer, F.C.
Alphabetisch Register op de Staats-Bijbladen van Nederlandsch-Indie
(Staatsblad 1816 t/m 1925)
(Bijblad No. 1 t/m 10845)
Nijmegen: F.E. Macdonald (1926), 384 bb.

- d) Scheltema de Heere, G.A.N.
Albrecht's Klapper op Het Staatsblad van
 Nederlandsch-Indie en op Het Bijblad op dat
 Staatsblad
 (Jaarvervolg over den SB.- Jaargang 1924 en
 het BB-Deel LXII)
 Leiden: A.W. Sijthoff's (1925?), 287 bb.
 (Jaarvervold over den SH-Jaargang 1922 en het
 BB-Deel LIX)
 Leiden: A.W. Sijthoff's (1923), 209 bb.
- e) Tobi, A.C.
Klappers of the Rijksbladen van de Rijken
 Jogjakarta en Pakoe-Alaman 1916 t/m 1932
 Djokdja: Buning (1933) 1416 bb.
- f) Wellen, J.W.J.
Zuid-Sumatra
 overzicht van de Literatuur der Gewesten
 Benkoelen , Djambi, de Lampoengsche
 Districten en Palembang.
 Deel II: Loopende van 1918 tot en met 1925.
 s-Gravenhage: de Nederlandsche Boeken
 Steendrukkerij (1928) 792 bb. (Uitgave van het
 Zuid-Sumatra Institut)

2) BAHAN PRIMER

- a) Terbitan Berkala
 i) Staatsblad
 ii) Bijblad
 iii) Javaasche Courant
 iv) Rijksbladen
- b) Himpunan Resmi
- c) Himpunan Swasta/Perorangan
- d) Himpunan Dwi-Bahasa

b. PERATURAN MASA PENDUDUKAN JEPANG

1) ALAT PENELUSURAN

2) BAHAN PRIMER

- a) Terbitan Berkala
 i) Kan Po

4. PENGATALOGAN PERATURAN

Ada baiknya peneliti hukum mengerti pola pengatalogan (katalogisasi) yang dipakai ataupun yang dapat dipakai untuk menyusun satu koleksi bahan peraturan. Pengetahuan ini dapat dipakai untuk lebih mengerti susunan koleksi orang lain maupun sebagai dasar penyusunan koleksi kita sendiri.

- a) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Manual Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Modul III: Pedoman Pengolahan
Sub-Modul III B: Pedoman Teknis Pengatalogan
Peraturan Perundangan-undangan Jakarta: BPHN (1988) 44 hal.
- b) Hardjoprakoso, Mastini dan Winarti Partaningrat
Pedoman Katalog Induk Peraturan Perundang-Undangan
Jakarta: BPHN (1978), Hal. 1-22
- c) Tairas, J.N.B.
Pedoman Katalogisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jakarta: BPHN (1978), Hal 1-52

5. PENENTUAN KEMUTAKHIRAN PERATURAN

Setiap kali kita menemukan kaedah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang kita menangani atau meneliti, kita dihadapkan dengan kebutuhan menentukan apakah kaedah itu masih berlaku dan kalau memang masih berlaku, apakah pernah terjadi perubahan ataupun pempatasan terhadapnya. Untuk keperluan ini, kita tergantung pada usaha penentuan kemutakhiran peraturan yang dapat dilaporkan dalam bentuk alat seperti indeks citation atau yang dapat ditangani dengan usaha yang dilakukan secara rutin seperti pembuatan abstrak peraturan yang baru ataupun anotasi terhadap peraturan yang lama.

a. INDEKS CITATION

- 1) Churchill, Gregory dan Wirawan Martoredjo
Pedoman Pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum
(TAPIS Hukum)
Jakarta: BPHN (1978), Hal 1-28.
- 2) TAPIS Hukum
Selesai
Koesnodiprodjo 1945-1949
Lembaran Negara 1950-1986
Bidang Perhubungan Laut 1945-1985

- 3) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum.
Daftar Penunjuk Peraturan Perundang-Undangan R.I.: Undang-Undang Tahun 1956-1976
Bandung: Alumni (1978), 185 hal.
- 4) Daftar Peraturan Orde Lama yang telah dicabut.
Jakarta (Tahun 1973)
- 5) Departemen Pertanian
Daftar Petunjuk Peraturan Perundang-undangan bidang Pertanian
- 6) Rosyidi, Muchtar
Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (1987) 458 hal.

b. ABSTRAK dan ANOTASI

- 1) Priyodarminto, Soegeng dan Gregory Churchill
Pedoman Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan R.I.
Jakarta: BPHN (1978), Hal. 1-39
- 2) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
 - a) Undang-Undang (1966-1978)
Jakarta: BPHN (1979), ix, 146 hal.
 - b) Peraturan Pemerintah Tahun 1966-1972.
Jakarta: BPHN (1982), xxxiv, 317 hal.
 - c) Peraturan Pemerintah Tahun 1973-1979.
Jakarta: BPHN (1982), xxxix, 322 hal.
 - d) Keputusan Presiden Tahun 1970-1979. Jakarta: BPHN (1984), lvi, 538 hal.
- 3) Bulletin Peraturan Perundang-Undangan (Penerbitan Bulanan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia) 1972 dan seterusnya.
- 4) Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
Abstrak Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri 1972-1983. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- 5) Indonesia. Departemen Kesehatan.
 - a) Indeks Beranotasi dari Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dan Kedokteran. Jakarta: Departemen Kesehatan (1981), 67 hal.

b) Indeks Beranótasi dari Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dan Kedokteran serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan, (1982).

6) Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum.

Himpunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan

a) Tahap Pertama

b) Tahap Kedua

c) Tahap Ketiga

7) Indonesia. Departemen Perhubungan
Abstrak Peraturan Bidang Perhubungan

8) Jakarta
Abstrak Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. YURISPRUDENSI/PUTUSAN PENGADILAN

1. ALAT PENELUSURAN

a. Sistimatik Penggolongan UNPAD

b. Sistimatik Penggolongan Mahkamah Agung

c. Kaartsystem Jurisprudentie Hindia Belanda

2. BAHAN PRIMER/SUMBER-SUMBER YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG/PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA

a. HIMPUNAN RESMI - Himpunan dari sumber resmi dengan putusan diterbitkan secara lengkap

1) Pengadilan Negeri

a) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri tahun 1976

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1976).

Jilid I : Perdata dan Acara Perdata 154 hal.

Jilid II : Pidana dan Acara Pidana 191 hal.

b) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum. Himpunan Putusan-

putusan Pengadilan-Negeri tahun 1977

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1977).

Jilid I (1977): Perdata dan Acara Perdata, 158 hal.

Jilid II (1977): Pidana dan Acara Pidana, 173 hal.

Triwulan II, Jilid I (1977) Perdata dan Acara Perdata, 119 hal.

Jilid II (1977) Pidana dan Acara Pidana, 191 hal.

Triwulan III, Jilid I (1977) Perdata dan Acara Perdata 114 hal.

Jilid II (1977) Pidana dan Acara Pidana, 213 hal.

Triwulan IV, Jilid I (1978) Perdata dan Acara Perdata 126 hal.

Jilid II (1978) Pidana dan Acara Pidana, 133 hal.

- c) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri tahun 1978

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1978).

Semester I Jilid I (1978) Perdata dan Acara Perdata 196 hal.

Jilid II (1978) Pidana dan Acara Pidana 188 hal.

Semester II Jilid I (1979) Perdata dan Acara Perdata 234 hal.

Jilid II (1979) Pidana dan Acara Pidana 171 hal.

- d) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri tahun 1979

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1979).

Semester I Jilid I (1979) Perdata dan Acara Perdata 210 hal.

Jilid II (1979) Pidana dan Acara Pidana 211 hal.

Semester II Jilid I (1980) Perdata dan Acara Perdata 218 hal.

Jilid II (1980) Pidana dan Acara Pidana 196 hal.

putusan Pengadilan-Negeri tahun 1977

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1977).

Jilid I (1977): Perdata dan Acara Perdata, 158 hal.

Jilid II (1977): Pidana dan Acara Pidana, 173 hal.

Triwulan II, Jilid I (1977) Perdata dan Acara Perdata, 119 hal.

Jilid II (1977) Pidana dan Acara Pidana, 191 hal.

Triwulan III, Jilid I (1977) Perdata dan Acara Perdata 114 hal.

Jilid II (1977) Pidana dan Acara Pidana, 213 hal.

Triwulan IV, Jilid I (1978) Perdata dan Acara Perdata 126 hal.

Jilid II (1978) Pidana dan Acara Pidana, 133 hal.

- c) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri tahun 1978

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1978).

Semester I Jilid I (1978) Perdata dan Acara Perdata 196 hal.

Jilid II (1978) Pidana dan Acara Pidana 188 hal.

Semester II Jilid I (1979) Perdata dan Acara Perdata 234 hal.

Jilid II (1979) Pidana dan Acara Pidana 171 hal.

- d) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri tahun 1979

Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1979).

Semester I Jilid I (1979) Perdata dan Acara Perdata 210 hal.

Jilid II (1979) Pidana dan Acara Pidana 211 hal.

Semester II Jilid I (1980) Perdata dan Acara Perdata 218 hal.

Jilid II (1980) Pidana dan Acara Pidana 196 hal.

- e) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1980. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman.
Semester I Jilid I (1980) Perdata dan Acara
Perdata 204 hal.
Jilid II (1980) Pidana dan Acara Pidana 229
hal.
Semester II Jilid I (1981) Perdata dan Acara
Perdata 227 hal.
Jilid II (1981) Pidana dan Acara Pidana 209
hal.
- f) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1981. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman.
Semester I Jilid I (1981) Perdata dan Acara
Perdata 278 hal.
Jilid II (1981) Pidana dan Acara Pidana 254
hal.
Semester II Jilid I (1982) Perdata dan Acara
Perdata ... hal.
Jilid II (1982) Pidana dan Acara Pidana ...
hal.
- g) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1982. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman.
Semester I Jilid I (1982) Perdata dan Acara
Perdata 232 hal.
Jilid II (1982) Pidana dan Acara Pidana 190
hal.
Semester II Jilid I (1983) Perdata dan Acara
Perdata 207 hal.
Jilid II (1983) Pidana dan Acara Pidana 341
hal.
- h) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1983. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman.
Semester I Jilid I (1983) Perdata dan Acara
Perdata 232 hal.
Jilid II (1983) Pidana dan Acara Pidana 253
hal.

Semester II Jilid I (1984) Perdata dan Acara Perdata 380 hal.
Jilid II (1984) Pidana dan Acara Pidana 394 hal.

- i) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri tahun 1984. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman.
Semester I Jilid I (1984) Pidana dan Acara Pidana 449 hal.
Jilid II (1984) Perdata dan Acara Perdata 421 hal.
Semester II Jilid I (1985) Pidana dan Acara Pidana 440 hal.
Jilid II (1985) Perdata dan Acara Perdata 410 hal.
- j) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri tahun 1985. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman.
Semester I Jilid I (1985) Perdata dan Acara Perdata 337 hal.
Jilid II (1985) Pidana dan Acara Pidana ... hal.
Semester II Jilid I (1986) Perdata dan Acara Perdata ... hal.
Jilid II (1986) Pidana dan Acara Pidana 283 hal.
- k) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri tahun 1986. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman.
Semester I Jilid I (1986) Perdata dan Acara Perdata 439 hal.
Jilid II (1986) Pidana dan Acara Pidana 385 hal.
Semester II Jilid I (1987) Perdata dan Acara Perdata 355 hal.
Jilid II (1987) Pidana dan Acara Pidana 342 hal.
- l) Indonesia. Direktorat Patent dan Hak Cipta.
Keputusan-keputusan Pengadilan tentang Sengketa Merek 1964-1970
Jakarta: Direktorat Patent dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an, Departemen Kehakiman (1980) 95 hal.

2) Pengadilan Tinggi

3) Mahkamah Agung

- a) Indonesia. Mahkamah Agung
Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi.
Jakarta: Proyek Yurisprudensi, Mahkamah Agung
(1979) 153 hal. [Yurisprudensi di lampiran
hal. 34-153]
- b) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I/69, Jakarta (31 Januari 1969) 134 hal.
II/69, Jakarta (1969) 129 hal.
III/69, Jakarta (1969) 129 hal.
IV/69, Jakarta (1969) 155 hal.
- c) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I-II-III-IV/69, Jakarta (1976), 799 hal.
Telah dihimpun kembali.
- d) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I/70, Jakarta (1970) 119 hal.
II/70, Jakarta (1970) 150 hal.
III/70 Jakarta (1970) 129 hal.
IV/70, Jakarta (1970) 145 hal.
- e) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1970
Jakarta (1977) 586 hal. (i-xi). Telah
dihimpun kembali dengan ejaan baru.
- f) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I/71, Jakarta (1971) 123 hal.
II/71, Jakarta (1971) 120 hal.
III/71, Jakarta (1971) 93 hal.
IV/71, Jakarta (1971) 115 hal.
- g) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1971
Jakarta (1978) 465 hal. (i-xxiii)
Telah dihimpun kembali dengan ejaan baru
- h) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I/72, Jakarta (1972) 204 hal.
II/72, Jakarta (1972) 115 hal.
III/72, Jakarta (1972) 109 hal.
IV/72, Jakarta (1972) 89 hal.

- i) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1972
(I-II-III-IV/72) Jakarta (1979) xv + 524 hal.
(i-xv). Telah dihimpun kembali dengan ejaan baru
- j) Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I-II-III-IV/73, Jakarta (1975) 571 hal.
- k) Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1974
Jakarta (1976) 453 hal.
- l) Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1975
Jakarta (1977) 649 hal.
- m) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1976
Jakarta (1978) xxvii + 646 hal. (i-xxvii)
- n) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1977 - I
Jakarta (1979) xxv + 582 hal. (i-xxv)
- o) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1977 - II
Jakarta (1980) xxii + 424 hal.
- p) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1978 - I
Jakarta (1981) xviii + 276 hal.
- q) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1978 - II
Jakarta (1981) xviii + 280 hal.
- r) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1979 - I
Jakarta (1982) xiv + 239 hal.
- s) Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1979 - II
Jakarta (1982) xiii + 287 hal. (i-xiii)
- t) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1980 - I
Jakarta (1983) xv + 331 hal.
- u) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1980 - II
Jakarta (1983) xiv + 332 hal.

- v) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1981 - I
Jakarta (1983) xiv + 320 hal.
- w) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1981 - II
Jakarta (1984) xiii + 322 hal.
- x) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1982 - I
Jakarta (1984) xiv + 290 hal.
- y) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1982 - II
Jakarta (1984) xii + 260 hal.
- z) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1983 - I
Jakarta (1985) xiv + 288 hal.
- aa) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1983 - II
Jakarta (1985) xiii + 294 hal.
- bb) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1984 - I
Jakarta (1986) xvii + 241 hal.
- cc) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1984 - II
Jakarta (1986) xvi + 257 hal.
- dd) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1985 - I
Jakarta (1987) xv + 249 hal.
- ee) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1985 - II
Jakarta (1987) xv + 249 hal.
- ff) Indonesia. Mahkamah Agung
Putusan-putusan Mahkamah Agung: Ukuran
Hukuman dalam Kasasi
Jakarta: Proyek Yurisprudensi (1982) 188 hal.

4) Pengadilan Agama

- a) Indonesia. Departemen Agama
Himpunan Putusan Kasasi tentang Peradilan
Agama
Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1984) viii + 282 hal.

- b) Indonesia. Departemen Agama
Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama (1978/1979)
 Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama (1979) xv + 344 hal.
- c) Indonesia. Departemen Agama
Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama (1979/1980)
 Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama (1980) xii + 285 hal.
- d) Indonesia. Departemen Agama
Himpunan Putusan Penetapan Agama (1980/1981)
 Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama (1981) ix + 406 hal.
- e) Indonesia. Departemen Agama
Himpunan Fatwa Pengadilan Agama
 Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama (1981) 138 hal.
- f) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1979
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1979) 135 hal.
- g) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1980/1981
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1981) ... hal.
- h) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1981/1982
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1982) 220 hal.
- i) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1982/1983
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1983) viii + 204 hal.

- j) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama (1983/1984)
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1987) v + 196 hal.
- k) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama (1984/1985)
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1986) ... hal.
- l) Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama (1985/1986)
 Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (1987) 237 hal.
- 5) Pengadilan Militer
- 6) Pengadilan Tata Usaha Negara
- 7) Mahkamah Pelayaran
- a) Indonesia. Mahkamah Pelayaran
Kumpulan Keputusan Mahkamah Pelayaran
 Jakarta: Kepaniteraan Perkara Mahkamah Pelayaran
 Jilid I : Tahun 1985 (1986) 289 hal.
 Jilid II : Tahun 1986 (1987) 382 hal.
- 8) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- a) Kodifikasi Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat [Bulanan]
- b) Kumpulan Keputusan² Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat P4P) Tahun 1980
 Jakarta: Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1981) 30 hal.
- b. RINGKASAN RESMI - Ringkasan dari sumber resmi dengan kaedah-kaedah dan pertimbangan-pertimbangan hukum saja.

- 1) Indonesia. Departemen Agama
Law Report Putusan/Penetapan Pengadilan Agama
 a) 1977 Jakarta: Proyek Pembinaan
 Badan Peradilan Agama (1980)
 b) 1978
 a) 1979 Jakarta: Proyek Pembinaan
 Badan Peradilan Agama (1981) 153 hal.
 d) 1980
 e) 1981 Jakarta: Bagian Proyek
 Pembinaan Administrasi Hukum dan
 Peradilan Agama (1982) 153 hal.

- 2) Indonesia. Direktorat Ketatalaksanaan
 Pengadilan.
Law-Report 1975/1976: Putusan-Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan
 Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
 Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1976)
 Jilid I Perkara Perdata dan Acara Perdata
 51 hal.
 Jilid II Perkara Pidana dan Acara Pidana
 79 hal.

- 3) Indonesia. Direktorat Pembinaan Administrasi
 Peradilan.
Law Report 1973 Putusan-Putusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi. Jakarta:
 Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan,
 Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan
 Peradilan, Departemen Kehakiman (1973)
 Jilid I Perkara Perdata dan Acara Perdata, 125
 hal.
 Jilid II Perkara Pidana dan Acara Pidana.

- 4) Indonesia. Mahkamah Agung.
Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung
Indonesia. Jakarta: Proyek Yurisprudensi,
Mahkamah Agung (1977)
 Jilid I Hukum Pidana dan Acara Pidana x + 98
 hal.
 Jilid II Hukum Perdata dan Acara Perdata xxvii +
 275 hal.
 Tambahan I (1985?) xiii + 54 hal.

- 5) Hasil Inventarisasi Yurisprudensi di daerah
 a) Pembinaan Hukum Yurisprudensi di Sumatera
Bagian Selatan (Proyek tahun 1976/1977).
 Palembang: Fakultas Hukum Universitas
 Sriwijaya & Pengadilan Tinggi Palembang.
 Buku I : Hukum Perdata (1977) x + 97 hal.
 Buku II : Hukum Pidana (1977) vii + 65 hal.

- b) Pembinaan Hukum Yurisprudensi di Sumatera Bagian Selatan (Proyek tahun 1977/1978).
Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya & Pengadilan Tinggi Palembang.
Buku I : Hukum Perdata (1979) viii + 93 hal.
Buku II : Hukum Pidana (1978) viii + 52 hal.
- c) Yurisprudensi Daerah Istimewa Aceh.
Darussalam - Banda Aceh: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Syiah Kuala & Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Buku I : Hukum Perdata (1977) viii + 45 hal.
Buku II : Hukum Pidana (1977) v + 28 hal.
Buku III : Hukum Perdata (1978) xiii + 75 hal.
Buku IV : Hukum Pidana
Buku V : Hukum Perdata (1979) xv + 104 hal.
Buku VI : Hukum Pidana (1979) xiv + 36 hal.
Buku VII : Hukum Perdata (1980) xii + 89 hal.
Buku VIII : Hukum Pidana (1981) xii + 51 hal.
- d) Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972
Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1974)
Buku I : Hukum Perdata xiii + 154 hal.
Buku II : Hukum Pidana x + 97 hal.
- e) Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1974-1975
Bandung: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan, Departemen Kehakiman (1976?).
Buku I : Hukum Perdata 72 hal., lamp.
Buku II : Hukum Pidana xiv + 46 hal., lamp.
- f) Yurisprudensi Jawa Timur 1975-1976
Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga & Pengadilan Tinggi Jawa Timur (1976).
Buku I : Hukum Pidana 254 hal, lamp.
Buku II : Hukum Perdata 168 hal.
- g) Yurisprudensi Jawa Timur 1975-1976
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1978)
Buku I : Hukum Pidana 254 hal, lamp.
Buku II : Hukum Perdata 168 hal.
- h) Yurisprudensi Kalimantan Selatan.
Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat & Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan/Tengah/Timur (1977)
Buku I : Hukum Perdata
Buku II : Hukum Pidana

- i) Yurisprudensi Sumatera Barat.
 Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat - Riau.
 Buku I : Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata (1978) xviii + 77 hal.
 Buku II : Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (1978) xv + 33 hal.
 Buku III: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata (1981) viii + 101 hal.
- j) Yurisprudensi Sumatera Utara
 Medan: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara & Pengadilan Tinggi Medan.
 Buku I : Hukum Perdata (1975) vii + 46 hal.
 Buku II : Hukum Pidana (1975) vi + 30 hal.
 Buku III : Hukum Perdata (1976) vii + 60 hal.
 Buku IV : Hukum Pidana (1976) v + 29 hal.
 Buku V : Hukum Perdata (1977) xiv + 39 hal.
- k) Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Irian Jaya. Jayapura: Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial, Universitas Cenderawasih & Pengadilan Tinggi Irian Jaya.
 Buku I : Hukum Pidana (1980) 40 hal.
 Buku II : Hukum Perdata (1980) vi + 84 hal.
- l) Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
 Ujung Pandang: Pengadilan Tinggi Ujung Pandang & Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 Buku I : Hukum Pidana (1980) ii + 25 hal.
 Buku II : Hukum Perdata (1980) ... hal.

c. HIMPUNAN NON-RESMI - Himpunan dari sumber non-resmi dengan putusan diterbitkan secara lengkap

- 1) Abdurrahman
Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria
 Bandung: Alumni (1980) 890 hal.
 (Seri Hukum Agraria VI)
- 2) Ali, Chidir
Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak
 Bandung: Tarsito (1978) 508 hal.
- 3) Ali Chidir
Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia
 I
 Jakarta: Pradnya Paramita (1982) vii + 632 hal.

- 4) Ali, Chidir
Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi Indonesia
Jakarta: Pradnya Paramita (1979) 222 hal.
- 5) Ali, Chidir
Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia
Jakarta: Pradnya Paramita (1979) 57 hal.
- 6) Ali, Chidir
Yurisprudensi Aneka Perjanjian
Bandung: Alumni (1981) 1068 hal.
- 7) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia
Bandung: Armico
Jilid 1 (1983) xxiv + 308 hal.
Jilid 2 (1983) xxv + 359 hal.
Jilid 3 (1984) xx + 337 hal.
- 8) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia
Bandung: Armico
Jilid 1 (1984) xxiv + 256 hal.
Jilid 2 (1984) 232 hal.
- 9) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Dagang
Bandung: Alumni (1982) x + 468 hal.
- 10) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Perburuhan
Bandung: Tarsito (1974) 149 hal.
- 11) Ali Chidir
Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia
Bandung: Armico
Jilid 1 (1984) xx + 318 hal.
Jilid 2 (1985) xx + 317 hal.
- 12) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia
Bandung: Alma'arif (1979) 437 hal.
- 13) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Perikatan
Bandung: Armico (1983) xxii + 504 hal.
- 14) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia
Bandung: Armico
Jilid 1 (1986) xxxii + 356 hal.

- 15) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Daluwarsa dan Pelepasan Hak
Bandung: Binacipta (1981) xix + 317 hal. (Seri Hukum Acara Perdata).
- 16) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Adat
Bandung: Binacipta
Jilid 1 (1986) xvii + 492 hal. (Seri Hukum Acara Perdata)
- 17) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria
Bandung: Binacipta (1979)
Jilid 1: Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan Tanah, Pencabutan Hak atas Tanah, xii + 499 hal.
Jilid 2: Pengadilan Landreform, Sewa Menyewa, Jaminan Kebendaan, Gadai Tanah, Pengasingan Tanah xii + 314 hal.
Jilid 3: Jual-Beli, Wewenang dan Tugas Keagrariaan, Pendaftaran Tanah xii + 559 hal.
- 18) Ali, Chidir.
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pembuktian
Jilid 1 : Bandung: Binacipta (1981)
404 hal. (Seri Hukum Acara Perdata)
Jilid 2: 837 hal. (Seri Hukum Acara Perdata)
- 19) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Ekonomi
Bandung: Binacipta (1982) xx + 327 hal.
- 20) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi Bandung: Binacipta (1979) xv + 617 hal.
- 21) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Tentara
Bandung: Binacipta
Jilid 1 (1982) x + 395 hal.
- 22) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)
Bandung: Binacipta (1977) xix 267 hal.

- 23) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechmatige
Overheidsdaad)
Bandung: Binacipta (1978) xix 668 hal.
- 24) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang sewa-menyewa
Rumah
Bandung: Binacipta (1982) xxxiv + 331 hal.
- 25) Ali, Chidir.
- a) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
tahun 1972-1975
Bandung: Binacipta (1981) xv + 500 hal.
(Jilid I Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)
 - b) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
Tahun 1976
Bandung: Binacipta (1981) x + 204 hal.
(Jilid II Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
tahun 1977
Bandung: Binacipta (1981) ix + 341 hal.
Jilid III Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)
 - d) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
Tahun 1978
Bandung: Binacipta (1981) vii 323 hal.
(Jilid IV Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)
 - e) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
Tahun 1979
Bandung: Binacipta (1982) 270 hal.
(Jilid V Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)
 - f) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
Tahun 1980
Bandung: Binacipta (1982) ix + 189 hal.
(Jilid VI Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)
- 26) Badaruzzaman, Mariam Darus
Keputusan-Keputusan tentang Perkara Perdata
Medan: Deli (1962) 399 hal.
- 27) Gautama, Sudargo
Himpunan Keputusan-Keputusan Hukum Antar
Golongan
Bandung: Alumni (ke-2, 1973) 404 hal.

- 28) Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata
Himpunan Keputusan Merek Dagang
Bandung: Alumni (1987) viii + 476 hal.
- 29) Nitisasmito, Roespandi
Himpunan Keputusan Pengadilan Negeri/Ekonomi
tentang Perkara-Perkara Subversi, Penyelundupan,
Penganiayaan, Pemerasan, Imigran Gelap,
Perniagaan Wanita, Perzinahan
Bandung: Binacipta (1981) 266 hal.
- 30) Poedjosoebroto, R. Santoso
Yurisprudensi Indonesia (Bagian Perdata)
Kumpulan Putusan Perkara Perdata
Bandung: Djambatan (1964) 622 hal.
- 31) Rubini, I., R. Roechimat dan M. Chidir Ali
Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung (1968 - 1976)
Bandung: Alumni (1977) 444 hal.
- 32) Saleh, Roeslan
Keputusan-Keputusan tentang Perkara Pidana
Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada
(ke-1, 1958) 285 hal.
(ke-2, 1961) 414 hal.
- 33) Samsudin, Achmad, Yusuf Anwar dan Achmad
Sulaiman Ali
Yurisprudensi Hukum Keluarga
Bandung: Alumni (1983) xxvi + 480 hal. (Seri
Hukum Adat I)
- 34) Samsudin, Achmad, Yusuf Anwar dan Achmad
Sulaiman Ali
Yurisprudensi Hukum Waris
Bandung: Alumni (1983) xxxii + 804 hal. (Seri
Hukum Adat II)
- 35) Sihombing, Herman dan Mahjuddin Salim
Hukum Adat Minangkabau dalam keputusan
Pengadilan Negeri di Sumatera Barat
Bandung: Alumni (1975) 180 hal.
- 36) Soemadipradja, Achmad
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung disertai
kaedah-kaedahnya
Bandung: Alumni (1977) 505 hal.
- 37) Soetioto, Ietje Saporinah
Himpunan Putusan-Putusan tentang Sengketa-
Sengketa Hukum Perdata
Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat (1964) 215 hal.

- 38) Subekti
Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi
 Mahkamah Agung
 Bandung: Alumni (1974) 125 hal.
- 39) Subekti dan J. Tamara
Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum
 Adat
 Jakarta: Gunung Agung (1961) 224 halaman
- 40) Supomo, Iman
Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4)
 Jakarta: Pradnya Paramita (1976)
- 41) Suryadarmawan, L.
Himpunan Keputusan-Keputusan dari Mahkamah Agung
Jilid I Mengenai Hukum Acara Pidana
 Jakarta: Isabella (1962) 304 hal.
Jilid II Mengenai Hukum Pidana
 (1967) 570 hal.

d. RINGKASAN NON-RESMI - Dengan putusan
 diterbitkan dalam ringkasan

- 1) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Inventarisasi Ringkasan Tulisan-Tulisan dan
 Yurisprudensi dari zaman sebelum tahun 1945
 Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
 Departemen Kehakiman (1981) 202 hal.
- 2) Mangkusubroto, Pietoyo
Keputusan-Keputusan tentang Perkara Perdata
 Purwokerto: oleh penyusun (1949-1956) 26 hal.
- 3) Saleh, K. Wantjik
Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata
 Jakarta: Ichtiar Baru (ke-1, 1973) 125 hal.
 Jakarta: Ichtiar Baru (ke-2, 1975) 132 hal.
 Jakarta: Pradnya Pramita (ke-3, 1985) 119 hal.

e. MAJALAH HUKUM - Yang menerbitkan yurisprudensi/
 putusan pengadilan secara lengkap

- 1) Djurnal Hukum - Majalah Bulanan Mahasiswa Hukum
 FHUI
 April, Mei, Juni 1972
- 2) Hoekoem - Madjallah Boelanan Perhimpoeenan Ahli
 Hoekoem Indonesia. Tahoen I, Nomer I, Maret
 1947.

- 3) Bulletin Aneka Perselisihan Perburuhan -
 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
 Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja -
 Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan
 Perburuhan Pusat
 Tahun I 1980/81
 Tahun II 1981/82
 Tahun III 1982/83
- 4) Hukum - Madjallah Perhimpunan Ahli Hukum
 Indonesia
 Tahun 1951 Nomor 1
 Tahun 1952 Nomor 1, 2, 3, 4-5
 Tahun 1953 Nomor 1, 2-3, 4-5 (dicetak 3-4)
 Tahun 1954 Nomor 1, 2-3
 Tahun 1955 Nomor 1-2, 3, 4-5, 6, 7-8
 Tahun 1956 Nomor 1-2, 3-4, 5-6
 Tahun 1957 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
 Tahun 1958 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
 Tahun 1959 Nomor 1-2, 3-4, 5-6,
- 5) Hukum dan Keadilan - Majalah PERADIN
 Tahun I 1970
 Tahun II 1971
 Tahun III 1972
 Tahun IV 1973
 Tahun V 1974
 Tahun VI 1978, No. 4, 5
 Tahun VII 1979, No. 7, 9, 10
 Tahun VIII 1980, No. 11, 12, 13, 14, 15
 Tahun IX 1981, No. 18
- 6) Hukum dan Kemasyarakatan - Fakultas Hukum
 USU-Medan
 Nomor 1 Tahun I Januari 1971
 Nomor 2/3 Tahun I Juli/November 1971
 Nomor 4/5 Tahun III Maret 1973
 Nomor 6/7 Tahun III Pebruari 1974
- 7) Hukum dan Masjarakat - Majalah Ikatan Sarjana
 Hukum Indonesia yang kemudian menjadi Majalah
 Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia
 Tahun 1960 Nomor 1, 2, 3-4-5-6
 Tahun 1961 Nomor 1-2, 3-4-5-6
 Tahun 1962 Nomor 1-2-3, 4-5-6
 Tahun 1963 Nomor 1
 Tahun 1964 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
 Tahun 1966 Nomor 1-2-3, 4-5-6
- 8) Hukum dan Pembangunan (dahulu Majalah Fakultas
 Hukum Universitas Indonesia)
 Tahun VII (1977) Nomor 4, 5, 6
 Tahun VIII (1978) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun IX (1979) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun X (1980) Nomor 1, 2, 3, -, 5, 6

Tahun XI (1981) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun XII (1982) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun XIII (1983) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun XIV (1984) Nomor 1, -, -, 4, 5, 6
 Tahun XV (1985) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun XVI (1986) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun XVII (1987) Nomor -, 2, 3, 4, 5, 6
 Tahun XVIII (1988) Nomor 1

- 9) Hukum Nasional - Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
 Nomor 2 Tahun I Okt, Nop, Des. 1968
 Nomor 14 Tahun IV Okt, Nop, Des. 1971
- 10) Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia
 Nomor 1 Tahun 1971
 Nomor 2 Tahun 1971
 Nomor 1,2,3 Tahun V (1975)
 Nomor 1,2,3,4,5,6 Tahun VI (1976)
- 11) Padjadjaran - Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
 Nomor 1/2 Jilid V Januari-April 1974
 Nomor 3/4 Jilid V Juli-Oktober 1974
 Nomor 1/2 Jilid VI Januari-April 1975
 Nomor 3/4 Jilid VI Juli-Oktober 1975
 Nomor 1/2 Jilid VII Januari-April 1976
 Nomor 3 Jilid VII Juli-September 1976
 Nomor 4 Jilid VII Desember 1976
 Nomor 1 Jilid VIII Triwulan I 1977
 Nomor 2 Jilid VIII Triwulan II 1977
 Nomor 3 Jilid VIII Triwulan III 1977
- 12) Pro Justitia - Majalah Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
 Nomor Perkenalan (1978)
 Nomor Kedua (1978)
 Nomor Ketiga (1978)
- 13) Sangkala Peradilan
 Tahun ke-I, Nomor I Triwulan I (1971)
- 14) Sriwijaya - Majalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Tahun ke-II, Nomor 3, Juli/September 1977
- 15) Varia Pengadilan - Majalah Ikatan Hakim Indonesia
 Tahun ke-III, Nomor 1-12 (1973)
- 16) Varia Peradilan - Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia
 Tahun ke-I (1985/86) Nomor 1-12
 Tahun ke-II (1986/87) Nomor 13-24
 Tahun ke-III (1987/88) Nomor 25-33
 (Juni '88)

C. TRAKTAT/PERJANJIAN

1. ALAT PENELUSURAN

- a. Agenda Perjanjian Bilateral
- b. Agenda Perjanjian Multilateral

2. BAHAN PRIMER

- a. Keputusan Presiden dan Undang-undang tentang Pengesahan (Ratifikasi)
 - 1) Lembaran Negara
 - 2) Himpunan Peraturan Negara
- b. INDONESIA. Departemen Luar Negeri. Kumpulan Teks Persetujuan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Negara Sahabat. Jakarta: Departemen Luar Negeri, Direktorat Penerangan dan Hubungan Kebudayaan (1972), 167 hal, ind.
- c. United Nations Treaty Services
- d. International Documents Quarterly

D. RISALAH LEGISLATIF DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. Risalah DPR (DPR-GR, DPRS)
- 2. Risalah MPR (MPR-GR, MPRS)
- 3. Terbitan RUU/RPP

E. AKTA RESMI

- 1. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
 - a. Tambahan Berita Negara: Perseroan-perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi
 - b. Bijvoegsel der Javasche Courant: Naamloze Vennootschappen, Vennootschappen Onder Firma of en Commandite en Cooperatieve Vereenigingen

- c. Indeks Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 1946-1978. Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum (PDH-FHUI) (1980) 359 hal.
 - d. Suplemen Indeks Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 1978-1980. Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum (PDH-FHUI) (1982)
 - e. Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an
Himpunan Keputusan Pengesahan Surat Keputusan Perseroan Terbatas
 - 1) Tahun 1978 (1981?)
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an, Departemen Kehakiman.
 - 2) Tahun 1979 (1982?)
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an, Departemen Kehakiman 355 hal
 - f. Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an
Himpunan Surat Keputusan Pengesahan Perseroan Terbatas Tahun 1980 (Jan s/d Jun 1980)
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an, Departemen Kehakiman (1983) 137 hal.
2. Anggaran Dasar Yayasan
- a. Tambahan Berita Negara: Anggaran Dasar Yayasan-yayasan
3. Merek
- a. Tambahan Berita Negara: Merek-merek Perusahaan dan Perniagaan
 - 1) Ruang I : Pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran.
 - 2) Ruang II : Penghapusan berlakunya pendaftaran.
 - 3) Ruang III : Pencatatan pemindahan hak.
 - 4) Ruang IV : Pemberitahuan dan perubahan.
 - 5) Ruang V : Pembedulan
 - b. Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an
Himpunan Merek-merek, 1973-
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang²an, Departemen Kehakiman (1974-)

- 1) Bagian pertama : merek menurut abjad
- 2) Bagian kedua : pemilik merek menurut abjad
- 3) Bagian ketiga : etiket merek menurut nomor pendaftaran
- 4) Bagian keempat : jenis barang menurut nomor pendaftaran
- 5) Bagian kelima : perubahan menurut nomor pendaftaran

4. Patent

5. Laporan Tahunan Pemerintah

6. Perubahan Nama Pribadi

a. Berita Negara

b. Indonesia. Departemen Kehakiman
Himpunan Daftar Surat Keputusan Perubahan Nama Berdasarkan Undang-undang No. 4/1961.

F. BUKU-BUKU/BAHAN SEKUNDER

1. BIBLIOGRAFI/DAFTAR PUSTAKA

a. Abdurachman

Daftar Kepustakaan Hukum Tanah
 Banjarmasin: PSHT (1978)

b. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum

1) Bibliografi Hukum 1979
 Jakarta: BPHN (1980), 350 hal.

2) Bibliografi Hukum 1980
 Jakarta: BPHN (1981), 260 hal.

c. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum

Daftar Buku/Kepustakaan Hukum sumbangan bahan-bahan untuk pemeragaan visuil pembinaan hukum dalam rangka seminar hukum nasional ke-IV tanggal 26-30 Maret 1979 di Jakarta
 Jakarta: BPHN (1979), 101 hal.

d. Churchill, Gregory dan Mulyana Kusumah

Bibliografi Hak-Hak Azasi Manusia dan Pengabdian Hukum

Jakarta: PDH-FHUI (1981)

- e. Churchill, Gregory
"Statement of Recommended Holdings of Indonesian
Legal Materials"
26 Malaya Law Review 364-439 (1984).
- f. Damian, Eddy and Hornick, Robert N.
1) Bibliografi Hukum Indonesia Daftar Pustaka Hukum
Terbitan 1945 s/d 1972 Bandung: Lembaga
Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran (1974), 837 hal.
2) Supplemen Bandung: Alumni (1981), 232 hal.
- g. Perpustakaan Nasional
Bibliografi Hukum di Indonesia 1945-1981
(disusun oleh W.W. Sayangbati dan M.T. Sitorus).
Jakarta: Perpustakaan Nasional, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (1982) 199 hal.
- h. Pringgoadisurjo, Luwarsih
Bibliografi Penerbitan Badan-Badan Pemerintah
Indonesia 1950-1969
Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (1971),
412 hal.
- i. Catalogus van de Bibliotheek van den Volksraad
Weltevreden: Landsdrukkerij (193)), 1235 bb.

2. KATALOG

- a. Katalog Kartu - Pusdok-BPHN, PDH-UI, Perpustakaan
Nasional, GAMA, dll.
- b. Terbitan Katalog - USU, Cornell, ANU dll.
1) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
Daftar Kepustakaan Fakultas Hukum USU Medan
- Jilid I MEDAN: FH-USU (1976), 326 hal.
- Jilid II Medan: FH-USU (1976), 327-807 hal.
2) Buxbaum, Richard and Gregory Churchill
List of Holdings: Law and Development Program
(yang ditempatkan di PDH-FHUI), (1976)

3. DAFTAR PENAMBAHAN KOLEKSI

- a. Berita Kepustakaan FHUI di Majalah Hukum dan
Pembangunan
- b. Daftar Tambahan Koleksi Perpustakaan Hukum Badan
Pembinaan Hukum Nasional.

c. Bibliografi Nasional Indonesia dari Perpustakaan Nasional.

d. Library of Congress Accessions List: Southeast Asia

G. DISERTASI/SKRIPSI

1. Basuki, Sulistyono
"Disertasi Hukum di Indonesia sebagai Informasi Hukum"
VIII/4 Hukum dan Pembangunan 418-425 (Juli 1978)
2. Bibliografi Skripsi Universitas Indonesia (Fakultas Sastra, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan) 1952-1970
Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Koninklijk Instituut voor Taal,-Land-en Volkenkunde (1979), 169 hal., ind.
Hukum pp. 37-66 Nos. 429-739
3. Daftar Skripsi dalam Damian, Eddy dan Robert N. Hornick, Bibliografi Hukum Indonesia 1945-1972, hal 619-838
4. Universitas Indonesia
Abstrak Skripsi Sarjana & Karya Tulis Keahlian Universitas Indonesia: Tahun 1979
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (1980), 401 hal., ind.
Hukum hal. 81-135
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi Hukum
Bibliografi Hukum Nasional 1979
Jakarta: BPHN (1980), hal 349-350

H. MAJALAH HUKUM

1. Basuki, Sulistyono
"Pertumbuhan Majalah Hukum di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) antara Tahun 1849-1942"
VIII/2 Hukum dan Pembangunan 651-667 (Maret 1978)
2. Churchill, Gregory dan Ny. Soelaeman Soemardi
Daftar Majalah Hukum Indonesia (Checklist Majalah Hukum Indonesia) Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum (PDH-FHUI) (1981) 51 hal.
3. Katalog Kartu Subyek Artikel Majalah Hukum (PDH-FHUI)
4. a. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Indeks Majalah Hukum. Jakarta: BPHN (1974)

- b. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Indeks Majalah Hukum 1980. Jakarta: BPHN (1980)
 199 hal.
5. Bibliografi Hukum Indonesia 1945-1972
6. Hulp-Klapper op het Indisch Tijdschrift van het Recht
 Deel 110 t/m 120
 Batavia: G. Kolff (), 1976
7. a. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Abstrak Hukum Indonesia/Indonesian Law Abstracts
1979 (dalam Bahasa Indonesia dan Inggris)
 Jakarta: BPHN (1979)
- b. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Abstrak Hukum Indonesia/Indonesian Law Abstracts
1980 (dalam Bahasa Indonesia dan Inggris)
 Jakarta: BPHN (1980) 256 hal., ind.
8. Perpustakaan Nasional
Katalog Majalah Terbitan Indonesia
- a. 1779-1927
 b. 1928-1941
 c. 1942-1980

I. CLIPPINGS DI BIDANG HUKUM

1. Hukum dalam Berita-Artikel-Tajuk Rencana
 Jakarta: Academica (Jl. Gondangdia Kecil No. 1A Tel:
 357865)
 Bulanan sejak Januari 1980 (dahulu nama penerbit
 adalah Jakarta Clippings Service s/d Februari 1980)
2. Hukum
 Jakarta: Cipta Clipping Agency
 (Jl. Batu Tulis Raya 52 Lt. II Tel: 360831-
 374695-371934)
 Mingguan sejak Januari 1980
3. Hukum
 Jakarta: Clippings Service Agency (Jl. Jambrot No. 2-4
 d/h Jl. Kramat VIII/2-4, tel: 345386)
 Harian sejak ? (PDH sejak Januari 1976).
4. Hukum
 Jakarta: Clipping Service
 Jalan Lautze No. 62C Krekot, Jakarta Pusat
 Tel: 375249
5. Perpustakaan Nasional
Indeks Berita dan Artikel Surat Kabar
Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan.